

## PROGRAM KETAHANAN PANGAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI DAN MENGURANGI KEMISKINAN DI KABUPATEN BIREUEN

Muhammad Rizal<sup>1\*)</sup>, Heri Gustami<sup>2</sup>, Hakim Muttaqim<sup>1</sup>, M Saleh<sup>1</sup>, Azka Rizkina<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Dosen Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Almuslim - Aceh

<sup>2</sup> Dosen Informatika Medis Fakultas Ilmu Komputer Universitas Almuslim - Aceh

\*) email: muhammadrizal@umuslim.ac.id

DOI: 10.55178/idm.v6i12.537

### Article history

Received:  
September 17, 2025

Revised:  
September 18, 2025

Accepted:  
September 19, 2025

Page:  
22 – 31

### Keywords:

*Food, village funds  
economic growth  
poverty  
food self-sufficiency*

**ABSTRACT:** This study aims to analyze the role of food security programs funded through village fund allocations in realizing food security at the rural level in Bireuen Regency. Using a qualitative approach that emphasizes observing the natural conditions of the objects, the research informants consisted of three main groups: the Village Head, Village Facilitators, and the community. The results showed that the food security program funded by village funds has a significant level of effectiveness. The program has been proven to contribute to reducing poverty in Bireuen Regency by providing access to more affordable and nutritious food for those in need. Furthermore, the assistance provided by village facilitators is not only limited to the distribution of food aid, but also directed at increasing community capacity in managing resources and utilizing available opportunities to achieve long-term sustainability. The community's response, which tends to be positive, is an indicator that the food security program through village funds provides real benefits in improving the quality of life of the people of Bireuen Regency

**ABSTRAK:** Penelitian bertujuan menganalisis peran program ketahanan pangan yang didanai melalui alokasi dana desa dalam mewujudkan ketahanan pangan di tingkat pedesaan di Kabupaten Bireuen. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang menekankan pada pengamatan kondisi objek secara alami. Informan penelitian terdiri dari tiga kelompok utama, yaitu Kepala Desa, Pendamping Desa, dan masyarakat. Hasilnya, program ketahanan pangan yang didanai oleh dana desa memiliki tingkat efektivitas yang signifikan. Program tersebut terbukti berkontribusi dalam menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Bireuen melalui penyediaan akses pangan yang lebih terjangkau dan bergizi bagi masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, pendampingan yang dilakukan oleh pendamping desa tidak hanya terbatas pada distribusi bantuan pangan, tetapi juga diarahkan pada peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya dan memanfaatkan peluang yang tersedia guna mencapai keberlanjutan jangka panjang. Respon masyarakat yang cenderung positif menjadi indikator bahwa program ketahanan pangan melalui dana desa memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat kabupaten Bireuen.

### Pendahuluan (Introduction)

Disebutkan dalam UU No. 18 Tahun 2012 tentang pangan (Suhud and Yuanita, 2019), bahwa permasalahan pangan menjadi tantangan global karena berkaitan langsung dengan kebutuhan hidup masyarakat (Suyastiri, 2022). Pemerintah pusat telah mengambil langkah-langkah dalam mengembangkan program ketahanan pangan dengan menerbitkan regulasi terkait penggunaan dana desa (Nurwanto, *et al.*, 2023). Tujuan penggunaan dana desa dalam upaya mendukung program ketahanan pangan adalah untuk meningkatkan pelayanan publik, mengurangi kemiskinan, dan mengembangkan ekonomi desa (Lindayadia, *et al.*, 2025).

Program ketahanan pangan yang dilaksanakan di pedesaan merupakan upaya pemerintah dalam mengatasi kemiskinan pasca pandemi covid-19 yang menyebabkan peningkatan angka kemiskinan di pedesaan (Ariyanti and Sukmana, 2024). Ketahanan pangan di tingkat rumah tangga merupakan landasan ketahanan pangan masyarakat yang selanjutnya menjadi pilar ketahanan pangan daerah dan nasional (Sutrisno, 2022). Program ketahanan pangan di desa juga merupakan implementasi dari tujuan pembangunan berkelanjutan desa atau disingkat SDGs Desa yaitu desa tanpa kelaparan yang menargetkan pada tahun 2030 tidak ada lagi kelaparan di desa (Tamrin, dan Nurdiah, 2023).

Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang tidak memiliki kemampuan untuk mengubah keadaan ekonomi dan sosialnya (Rizkina *et al.*, 2024). Tingkat kemiskinan sangat memengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, Jika angka kemiskinan di suatu wilayah tinggi, maka kemiskinan akan semakin sulit diberantas dan ekonomi akan menurun (Wang, 2023). Penanggulangan kemiskinan merupakan poin penting dari SDGs (Y. Song, *et al.*, 2023). Dalam menangani kemiskinan, Pemerintah Indonesia berupaya melakukan inklusi keuangan (Sudaryanto *et al.*, 2023). Prioritas utama Pemerintah Indonesia dalam penanggulangan kemiskinan adalah meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui perlindungan sosial dan program ketahanan pangan lokal (Audi Rahmatika *et al.*, 2024). Kesejahteraan ekonomi pada hakikatnya adalah pendapatan yang dihasilkan atau diberikan dalam situasi tertentu untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga (H. Zou, 2024).

Kegiatan program ketahanan pangan dana desa telah dijalankan oleh seluruh desa di provinsi aceh mulai tahun 2023, berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) dana desa untuk ketahanan pangan di provinsi aceh tahun 2024 mencapai Rp4,95 triliun, Dana tersebut disalurkan melalui berbagai program pemberdayaan, bantuan langsung tunai (BLT), dan ketahanan pangan. Program ini sering kali menghadapi sejumlah tantangan yang dapat memengaruhi keberhasilannya, seperti terbatasnya sumber daya manusia yang ada di desa, kemiskinan namun jika dikelola dengan baik, program ketahanan pangan dana desa dapat menjadi alternatif yang sangat efektif untuk memperkuat ketahanan pangan lokal dan menciptakan kemandirian pangan, memastikan ketersediaan pangan yang cukup, bergizi, dan terjangkau di tingkat lokal.

Isu ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan merupakan dua tantangan utama dalam pembangunan berkelanjutan, khususnya di kawasan pedesaan yang rentan terhadap fluktuasi ekonomi, keterbatasan akses terhadap sumber daya, serta minimnya infrastruktur dan pelayanan dasar. Di Indonesia, desa merupakan fondasi utama pembangunan nasional, sekaligus menjadi arena utama bagi berbagai upaya pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat (Arifin *et al.*, 2024). Saat ini kebijakan Dana Desa yang diluncurkan oleh pemerintah sejak tahun 2015 melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi instrumen strategis dalam mendorong pembangunan berbasis kebutuhan lokal. Salah satu fokus penting dari penggunaan Dana Desa dalam beberapa tahun terakhir adalah pada sektor ketahanan pangan (Suhartono, 2025). Program Ketahanan Pangan Dana Desa bertujuan tidak hanya untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat desa, tetapi juga menciptakan aktivitas ekonomi produktif yang mampu meningkatkan pendapatan rumah tangga, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat kemandirian ekonomi desa (Akmal and Solichin, 2023).

Provinsi Aceh menjadi daerah yang menarik untuk dianalisis, meskipun memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah dan dukungan fiskal yang relatif kuat melalui Dana Otonomi Khusus dan Dana Desa, Aceh masih menghadapi tantangan serius terkait tingginya angka kemiskinan, terutama di kawasan perdesaan. Berdasarkan data BPS, sebagian besar penduduk miskin di Aceh berada di sektor pertanian dan perdesaan, yang ironisnya merupakan sektor utama penerima manfaat dari program ketahanan pangan. Oleh karena itu, efektivitas pelaksanaan program ini dalam menjawab persoalan riil di tingkat desa menjadi pertanyaan penting yang perlu ditelaah secara mendalam.

Penelitian bertujuan untuk menganalisis dan menggali sejauh mana intervensi melalui program tersebut telah berhasil memperkuat kapasitas produksi pangan lokal, menciptakan nilai tambah ekonomi, serta memperkuat ketahanan sosial-ekonomi masyarakat desa. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program, termasuk aspek perencanaan, partisipasi masyarakat, dan tata kelola keuangan desa.

## Tinjauan Literatur (*Literature Review*)

### a). Kemiskinan

Kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan individu atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan (Y. Song, *et al.*, 2023). Informasi

BPS, kemiskinan diukur berdasarkan garis kemiskinan, yang mencerminkan kebutuhan minimum untuk hidup layak. Kemiskinan tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan struktural, seperti keterbatasan akses terhadap pelayanan publik, lapangan kerja, dan Pendidikan. Beberapa teori kemiskinan menggarisbawahi faktor penyebabnya. Teori struktural menekankan peran ketimpangan distribusi sumber daya, sedangkan teori kultural melihat kemiskinan sebagai akibat dari nilai dan kebiasaan yang membatasi produktivitas individu.

Di konteks pedesaan, kemiskinan sering kali berkaitan erat dengan rendahnya produktivitas sektor pertanian dan keterbatasan akses modal (Pinstrup, *et al.*, 2011). Berbagai program intervensi pemerintah seperti Dana Desa dan program ketahanan pangan ditujukan untuk mengatasi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi lokal. Penelitian terkait efektivitas program-program ini masih diperlukan guna memastikan kebijakan yang tepat sasaran dan berkelanjutan dalam upaya pengentasan kemiskinan, khususnya di daerah tertinggal seperti Provinsi Aceh.

Studi tentang Ketimpangan Sosial dan Kemiskinan: Analisis Literatur Sistematis terhadap Perspektif Ekonomi dan Sosial” Pratama *et al.*, (2025) mengidentifikasi bahwa literatur tentang kemiskinan menunjukkan fenomena multidimensi: faktor pendapatan rumah tangga, akses ke layanan dasar (pendidikan, kesehatan), dan ketahanan sosial-ekologis sering muncul sebagai variabel penting. Program bantuan sosial (seperti BLT, Program KPM) sering disebut sebagai instrumen langsung dalam mengurangi beban masyarakat miskin, terutama dalam merespons kondisi darurat (misalnya pandemi Covid-19). Studi “Evaluation Of Social Assistance Programs In Reduction Poverty During The Covid-19 Pandemic: Economic Perspective” oleh Nasution *et al.* menunjukkan bahwa program bantuan sosial efektif mengurangi dampak sosial ekonomi yang diperparah selama pandemi (Rahmansyah, 2023). Penelitian *Fund and Rural Poverty: Evidence from North Aceh, the Poorest Region in Aceh*, menyoroti bahwa dana desa (village funds) memiliki potensi dalam mendorong pembangunan desa dan mengurangi kemiskinan, meskipun hasilnya dipengaruhi oleh bagaimana dana tersebut digunakan, kapasitas desa, dan kelembagaan lokal (Silvia Zahara *et al.*, 2024).

#### **b). Ketahanan Pangan**

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, baik dari segi jumlah maupun kualitas, aman, merata, dan terjangkau (Suyastiri, 2022). Konsep ini mencakup empat pilar utama: ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas pangan. Ketahanan pangan tidak hanya menjadi isu global, tetapi juga menjadi tantangan lokal, terutama di wilayah pedesaan dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Penelitian oleh (Ariyanti and Sukmana, 2024) menekankan pentingnya intervensi berbasis komunitas dan partisipasi masyarakat dalam menjamin keberlanjutan ketahanan pangan. Di Provinsi Aceh, tantangan geografis, konflik masa lalu, dan keterbatasan infrastruktur menjadi faktor penghambat utama. Oleh karena itu, kajian mendalam terhadap implementasi program ketahanan pangan berbasis desa sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kerawanan pangan.

Temuan dari penelitian (Yuliana, 2018) tentang Strategi penggunaan Dana Desa di Desa Kuwu, Demak. Dengan analisis SWOT, hasilnya mengindikasikan bahwa fokus penggunaan Dana Desa masih banyak ke pembangunan fisik (infrastruktur) sementara aspek produksi pangan, diversifikasi pangan, dan penguatan SDM petani masih bisa diperkuat. Selanjutnya penelitian mengenai kebijakan pemerintah daerah yang dilakukan oleh (Zakiah and Fauzan, 2018) menggunakan data panel dari 21 kabupaten/kota di Aceh antara 2007-2016 untuk menganalisa berbagai kebijakan pemerintah termasuk pengeluaran sektor pertanian dan stabilisasi harga pangan. Mereka menemukan bahwa kombinasi kebijakan yang mencakup bantuan modal pertanian dan stabilisasi harga pangan lebih efektif dalam meningkatkan ketahanan pangan dan mengurangi kemiskinan dibandingkan kebijakan yang berdiri sendiri.

#### **c). Dana Desa**

Dana Desa merupakan alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan langsung kepada desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat desa (UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa). Tujuannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah. Menurut Keputusan Menteri Desa bahwa dana desa menjadi instrumen penting dalam mendorong kemandirian desa melalui pendekatan partisipatif dan berbasis kebutuhan lokal. Pelaksanaan Dana Desa harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) agar efektif dan tepat sasaran. Studi Bappenas menunjukkan bahwa dana desa berkontribusi terhadap peningkatan infrastruktur

dasar desa, namun efektivitasnya dalam pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan masih bervariasi di tiap daerah.

Di Aceh, tantangan dalam implementasi Dana Desa antara lain adalah kapasitas aparat desa yang belum merata, lemahnya perencanaan partisipatif, dan pengawasan yang terbatas. Oleh karena itu, penelitian terhadap efektivitas pemanfaatan Dana Desa, khususnya dalam program strategis seperti ketahanan pangan, sangat penting untuk memastikan bahwa dana yang besar ini benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan (Tamrin, and Nurdiyah, 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh (Sumarto, 2025) mengkaji dampak village fund (VF) terhadap kesejahteraan pedesaan di seluruh Indonesia menggunakan metode Regression Discontinuity in Time (RDiT) dan *Difference-in-Difference* (DiD). Hasilnya menunjukkan bahwa VF memiliki efek positif signifikan terhadap kesejahteraan pedesaan, khususnya di desa-desa yang tergolong kurang berkembang. Selanjutnya penelitian Analisis Kebijakan Dana Desa (Bahri, 2022) menunjukkan bahwa Dana Desa telah memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi di desa (jalan, irigasi, jembatan, sarana pasar, air bersih), sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa walaupun masih ada hambatan seperti kapasitas lokal dan transparansi.

## Metode Penelitian (*Methodology*)

### a). Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Peneliti berperan sebagai instrumen kunci, sedangkan pemilihan sumber data dilakukan secara purposive serta melalui teknik snowball. Pengumpulan data menggunakan triangulasi (gabungan berbagai teknik), sementara analisis datanya bersifat induktif atau kualitatif. Hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna yang diperoleh daripada sekadar generalisasi (Sugiyono, 2016).

### b). Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian berperan sebagai fokus utama yang dianalisis dan diamati guna memperoleh pemahaman terhadap fenomena yang diteliti. Selain itu, objek penelitian mengenai peran program ketahanan pangan dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan mengurangi kemiskinan: sebuah analisis di provinsi aceh bersifat dinamis dan dapat mengalami variasi maupun perubahan selama proses penelitian berlangsung. Perubahan ini dipengaruhi oleh perkembangan analisis serta temuan-temuan yang diperoleh peneliti, yang pada gilirannya memengaruhi pemahaman terhadap objek penelitian dan penyusunan kesimpulan akhir.

Subjek penelitian mencakup berbagai pihak atau entitas yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut. Penelitian dilakukan di 4 (empat) Kecamatan di Kabupaten Bireuen, yaitu Kecamatan Peusangan, Kecamatan Kota Juang, Kecamatan Gandapura dan Kecamatan Juli yang dilaksanakan pada bulan agustus 2025.

### c). Informan Penelitian

Pemilihan informan menjadi tahapan penting untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang dikaji. Informan yang dipilih secara tepat dapat memberikan beragam wawasan serta membantu peneliti memperoleh perspektif yang lebih menyeluruh terhadap topik penelitian. Pada penelitian peran program ketahanan pangan dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan mengurangi kemiskinan: sebuah analisis di provinsi aceh, pemilihan informan dilakukan secara hati-hati agar data yang diperoleh tetap relevan, akurat, dan bervariasi.

Dalam penelitian ini, informan dibagi ke dalam tiga kelompok utama, yakni Kepala Desa, Pendamping Desa, dan masyarakat. Masing-masing kelompok memiliki peran serta kontribusi yang berbeda dalam pelaksanaan program Dana Desa. Kepala Desa, sebagai pemimpin administratif di tingkat lokal, memiliki akses terhadap berbagai data dan informasi resmi mengenai program yang dijalankan di wilayahnya. Sementara itu, Pendamping Desa berperan langsung dalam memberikan pendampingan serta bimbingan kepada masyarakat. Adapun masyarakat, sebagai pihak yang menjadi subjek utama program, menyumbangkan pengalaman dan pandangan berharga terkait pelaksanaan program serta dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari.

### d). Metode Pengumpulan Data

Dilakukan dalam kegiatan wawancara yang mendalam mengenai isu atau tema yang menjadi fokus penelitian. Selain itu, wawancara juga berfungsi sebagai sarana verifikasi atau pembuktian atas informasi yang sebelumnya diperoleh melalui metode pengumpulan data lainnya.

Juga diterapkan metode dokumentasi untuk menelusuri data historis, baik berupa dokumen mengenai individu, kelompok, peristiwa, maupun kejadian dalam suatu situasi sosial, yang sangat bermanfaat dalam penelitian kualitatif. Dan dengan observasi atau pengamatan dengan melihat, mendengar objek penelitian, lalu menarik kesimpulan dari hasil pengamatannya.

#### ***e). Teknik Analisis Data***

Penelitian kualitatif dari berbagai sumber, seperti wawancara, observasi, catatan lapangan, maupun dokumentasi. Proses analisis data menyusun, mengorganisasi, serta menafsirkan data agar dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan terperinci mengenai fenomena yang diteliti. Menurut (Sugiyono, 2019, dan Marwan *et al.*, 2023) analisis data kualitatif mencakup tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

- 1) Reduksi data merupakan tahap awal dalam analisis data kualitatif yang mencakup proses pemilihan, penyaringan, serta pemfokusan pada data yang dianggap relevan. Proses reduksi juga melibatkan pembuangan data yang tidak memberi kontribusi berarti terhadap pemahaman fenomena yang diteliti, sehingga peneliti lebih mudah dalam menyusun kesimpulan akhir.
- 2) Model data, merupakan kelanjutan dari proses analisis yang berfokus pada penyusunan informasi secara terstruktur dan sistematis. Model data berfungsi untuk merangkum hasil analisis sebelumnya, termasuk deskripsi temuan, kesimpulan, serta rekomendasi tindakan yang mungkin dilakukan. Sehingga menyajikan informasi dalam bentuk yang lebih mudah diakses dan dipahami yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 3) Penarikan kesimpulan, merupakan fase akhir dalam analisis data kualitatif yang melibatkan penggabungan berbagai informasi dan temuan yang telah diperoleh. Simpulan dapat diverifikasi kembali untuk memastikan validitas dan keakuratan hasil penelitian.

### **Hasil dan Pembahasan (*Results and Discussion*)**

#### ***a). Peran Program Ketahanan Pangan Dana Desa Mengurangi Kemiskinan***

Pada tahun 2024, persentase penduduk miskin di Kabupaten Bireuen tercatat sebesar 12,10 persen, menurun 0,96 persen dibandingkan tahun 2020. Jika dibandingkan dengan angka kemiskinan di Provinsi Aceh yang mencapai 14,23 persen dan tingkat kemiskinan nasional sebesar 8,57 persen pada tahun yang sama, maka posisi Kabupaten Bireuen berada di bawah rata-rata provinsi namun masih lebih tinggi daripada capaian nasional. Kondisi ini mencerminkan bahwa pencapaian indikator kemiskinan di Kabupaten Bireuen tahun 2024 cukup sejalan dengan perkembangan di tingkat provinsi maupun nasional. Secara keseluruhan, tren persentase penduduk miskin di Kabupaten Bireuen selama periode 2015–2019 menunjukkan penurunan rata-rata sebesar 0,33 persen per tahun.

**Tabel 1.** Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin (persen)

Wilayah	2020	2021	2022	2023	2024
Indonesia	10,18	9,71	9,57	9,36	8,57
Provinsi Aceh	14,99	15,33	14,64	14,45	14,23
Kabupaten Bireuen	13,06	13,25	12,51	12,12	12,10

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Tren penurunan tingkat kemiskinan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan dan program yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen cukup efektif serta memberikan dampak positif dalam mengurangi jumlah penduduk miskin. Selama periode 2020–2025, penurunan persentase kemiskinan di Kabupaten Bireuen bergerak sejalan dengan perkembangan yang terjadi di tingkat Provinsi Aceh maupun nasional. Namun demikian, rata-rata penurunan kemiskinan di Kabupaten Bireuen yang sebesar 0,25 persen masih berada di bawah rata-rata penurunan di provinsi Aceh sebesar 0,35 persen serta rata-rata nasional yang mencapai 0,42 persen.

Keselaras perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Bireuen dengan tren di Provinsi Aceh maupun nasional menunjukkan bahwa berbagai langkah yang ditempuh oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait telah memberikan hasil yang signifikan. Upaya tersebut dilakukan melalui sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan agar

lebih terarah, efektif, dan tepat sasaran, baik dengan program Pemerintah Provinsi Aceh maupun Pemerintah Pusat, serta melalui penyaluran berbagai bentuk bantuan, termasuk hibah dan bantuan lainnya yang mendukung pengentasan kemiskinan.



**Gambar 1. Tren Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh dan Indonesia Tahun 2020-2024**

Analisis terhadap prioritas penanganan kemiskinan di Kabupaten Bireuen menunjukkan bahwa perkembangan indikator tingkat kemiskinan belum sepenuhnya selaras dengan dinamika indeks kedalaman dan keparahan tingkat kemiskinan, yang dipengaruhi oleh capaian pada periode sebelumnya. Kondisi ini mengindikasikan rendahnya keterkaitan antar indikator tersebut, di mana penurunan atau kenaikan tingkat kemiskinan tidak berjalan konsisten dengan perubahan pada indeks kedalaman maupun keparahan kemiskinan. Dari ketiga indikator tersebut, aspek yang memerlukan prioritas penanganan adalah indeks keparahan kemiskinan, karena mencerminkan adanya ketimpangan distribusi pengeluaran di antara kelompok penduduk miskin di Kabupaten Bireuen.

Dalam bidang kemiskinan dan ketenagakerjaan di Kabupaten Bireuen., perkembangan indikator tingkat kemiskinan menunjukkan konsistensi dengan dinamika ketenagakerjaan, yang tercermin dari indikator tingkat pengangguran terbuka dan tingkat partisipasi angkatan kerja. Konsistensi tersebut dipengaruhi oleh capaian pada periode sebelumnya dan mengindikasikan bahwa faktor pengangguran memiliki peran signifikan terhadap kondisi kemiskinan. Peningkatan partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Bireuen. secara berkelanjutan sejak tahun 2020 hingga 2025 berjalan seiring dengan penurunan tingkat pengangguran terbuka, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan di daerah tersebut.

Pemerintah telah melaksanakan berbagai program penanggulangan kemiskinan yang diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat secara layak, peningkatan kesejahteraan sosial-ekonomi, serta percepatan pembangunan daerah guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera. Namun demikian, upaya pengentasan kemiskinan tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga menuntut kesadaran kolektif bahwa persoalan sosial ini merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Berdasarkan data BPS, dalam kurun waktu lima tahun angka kemiskinan di Kabupaten Bireuen menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2020 tingkat kemiskinan tercatat sebesar 13,06%, turun menjadi 12,51% pada tahun 2022, dan selanjutnya menurun hingga 12,10% pada tahun 2024. Capaian tersebut relatif lebih baik dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Provinsi Aceh yang tercatat sebesar 14,99% pada tahun 2020, menurun menjadi 14,64% pada tahun 2022, dan 14,23% pada tahun 2024. Sementara itu, angka kemiskinan nasional pada periode yang sama juga menurun dari 10,18% tahun 2020 menjadi 9,57% tahun 2022, dan 8,57% tahun 2024. Oleh karena itu, percepatan upaya penanggulangan kemiskinan tetap diperlukan guna mendorong penurunan tingkat kemiskinan yang lebih signifikan.

Peran pemerintah berperan signifikan yang tinggi, mengingat kebijakan dan regulasi yang ditetapkan menjadi landasan utama dalam mendorong arah pembangunan. Upaya pengentasan kemiskinan diawali dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Desa No 2 Tahun 2024 tentang petunjuk operasional atas fokus penggunaan Dana Desa, yang menekankan pentingnya koordinasi terpadu lintas pemangku kepentingan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Sebagai tindak lanjut, pemerintah menghadirkan inovasi program berupa Ketahanan Pangan minimal 20 persen dari anggaran Dana Desa sebagai salah satu instrumen percepatan penanggulangan kemiskinan. Menurut (Iriyanto *et al.*, 2025) Program ketahanan pangan di desa merupakan salah satu strategi yang dirancang untuk menekan angka kemiskinan ekstrem di tingkat pedesaan. Selain itu, program ini juga diarahkan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan bagi seluruh masyarakat desa serta mengurangi potensi kerawanan pangan. Upaya tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan, antara lain pelatihan, pengembangan, serta penyediaan sarana produksi dan teknologi pendukung.

Program ketahanan pangan mulai diimplementasikan di Kabupaten Bireuen mulai dari tahun 2023, Penyaluran Program ketahanan pangan di setiap desa dilakukan melalui mekanisme distribusi langsung oleh pemerintah desa. Keberhasilan suatu program pemerintah dapat diukur melalui ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan. Program penanggulangan kemiskinan tidak hanya berorientasi pada penurunan angka kemiskinan, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan masyarakat yang berdaya melalui implementasi yang efektif agar tujuan program dapat terwujud. Efektivitas menjadi tolok ukur utama dalam menilai keberhasilan suatu program. Menurut (Lindayadia, et al., 2025) menyatakan bahwa efektivitas program dapat ditinjau dari sejumlah indikator, antara lain ketepatan penentuan waktu, ketepatan dalam menentukan pilihan, ketepatan dalam merumuskan tujuan, serta ketepatan sasaran. Dengan demikian, pengukuran efektivitas memiliki peran penting karena efektivitas merupakan elemen fundamental dalam pencapaian tujuan maupun sasaran pada setiap organisasi, kegiatan, atau program.

Program ketahanan pangan yang bersumber dari Dana Desa memiliki peran strategis dalam mengurangi tingkat kemiskinan, khususnya di Kabupaten Bireuen. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa kemiskinan di wilayah pedesaan umumnya berkaitan erat dengan keterbatasan akses terhadap pangan, rendahnya produktivitas pertanian, serta minimnya sarana produksi yang mendukung kesejahteraan masyarakat desa. Melalui alokasi Dana Desa, pemerintah desa di Kabupaten Bireuen dapat melaksanakan berbagai program yang berorientasi pada peningkatan kemandirian pangan, seperti pelatihan keterampilan budidaya pertanian dan peternakan, pengembangan teknologi tepat guna, serta pengadaan sarana produksi. Kegiatan-kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan pangan, tetapi juga mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi lokal yang berimplikasi pada meningkatnya pendapatan masyarakat.

Peran program ketahanan pangan menjadi signifikan karena mampu menjawab dua permasalahan pokok sekaligus, yaitu kerawanan pangan dan keterbatasan ekonomi masyarakat miskin. Dengan adanya peningkatan ketersediaan dan akses pangan, masyarakat desa di Kabupaten Bireuen dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka secara lebih berkelanjutan. Di sisi lain, penguatan sektor pertanian melalui program ini juga berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, serta pemberdayaan masyarakat dalam mengelola potensi lokal. Oleh karena itu, saat ini implementasi program ketahanan pangan Dana Desa di Kabupaten Bireuen dapat dipahami sebagai salah satu instrumen penting dalam strategi penanggulangan kemiskinan. Program ini tidak hanya mengurangi angka kemiskinan secara kuantitatif, tetapi juga mendorong terciptanya masyarakat desa yang lebih mandiri, berdaya saing, dan tahan terhadap risiko kerawanan pangan.

Menurut BPS Kabupaten Bireuen persentase penduduk miskin di 2024 sebesar 12,10 % yang relatif stabil tetapi menunjukkan sedikit penurunan antara beberapa periode. Pada 2022 sekitar 12,51% dan 12,1% (per 30 Nov 2024). Penurunan meskipun kecil ini merupakan salah satu indikator makro yang relevan ketika menilai dampak program penanggulangan kemiskinan di tingkat kabupaten. Pemerintah kabupaten Bireuen menegaskan kebijakan agar sebagian Dana Desa dialokasikan untuk program ketahanan pangan melalui peraturan bupati Bireuen nomor 39 tahun 2023 tentang mekanisme pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja kabupaten Bireuen tahun anggaran 2024.

Keberadaan anggaran yang teralokasi merupakan bukti nyata bahwa sumber daya fiskal diarahkan untuk intervensi ketahanan pangan di desa-desa, sehingga program ketahanan pangan yang didanai melalui Dana Desa memiliki posisi strategis dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Bireuen. Hal ini dikarenakan sebagian besar masyarakat miskin di wilayah tersebut menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan memiliki kerentanan tinggi terhadap kerawanan pangan. Melalui alokasi Dana Desa, pemerintah desa dapat melaksanakan berbagai kegiatan yang berorientasi pada peningkatan ketersediaan dan akses pangan, seperti pelatihan pertanian, pengadaan sarana produksi, serta pemanfaatan teknologi tepat guna untuk mendukung produktivitas masyarakat desa.

#### ***b). Peran Program Ketahanan Pangan Dana Desa Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi***

Program ketahanan pangan dirancang untuk memperkuat kemandirian desa dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Program ini bertujuan tidak hanya untuk memastikan ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas pangan, tetapi juga untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian, memberdayakan petani lokal, serta menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan. Dengan pengelolaan yang berbasis potensi lokal, dana desa diarahkan guna mendukung pembangunan infrastruktur pertanian, penyediaan sarana produksi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan kelembagaan ekonomi desa.

Untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan tersebut, peneliti melaksanakan wawancara mendalam dengan sejumlah informan di Desa dalam Kabupaten Bireuen. Pemilihan desa ini sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa kondisi sosial-ekonominya dianggap representatif terhadap

karakteristik wilayah pedesaan di Indonesia yang menjadi penerima program ketahanan pangan melalui dana desa. Peneliti melaksanakan wawancara dengan tiga kategori informan utama, yakni Kepala Desa, Pendamping Pemberdayaan Desa, serta masyarakat.

Kepala Desa menyampaikan perspektif terkait implementasi program dari sudut pandang pemerintahan desa, termasuk berbagai kendala yang muncul dalam pelaksanaan program ketahanan pangan melalui dana desa. Pendamping Pemberdayaan Desa, sebagai aktor yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan program, memberikan informasi mengenai mekanisme pengalokasian anggaran, proses koordinasi antar lembaga, serta hambatan teknis yang dihadapi di lapangan. Adapun masyarakat berperan sebagai sumber informasi yang menilai secara langsung dampak program ketahanan pangan melalui dana desa terhadap pemenuhan kebutuhan pangan mereka dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk memahami perspektif masyarakat penerima manfaat terhadap program ketahanan pangan melalui dana desa, analisis dilakukan berdasarkan beragam pandangan yang diperoleh melalui wawancara langsung. Masyarakat pada umumnya menyatakan bahwa pemahaman mereka mengenai program tersebut diperoleh dengan baik berkat sosialisasi dari pendamping desa yang merupakan bagian dari Kementerian Desa. Pendamping tidak hanya berperan dalam memberikan edukasi mengenai pemanfaatan bantuan, tetapi juga aktif terlibat dalam forum musyawarah khusus, baik di tingkat kecamatan maupun desa, guna menyampaikan informasi terkait program. Namun demikian, sebagian masyarakat mengemukakan adanya kekhawatiran mengenai ketepatan sasaran program. Mereka menekankan perlunya peningkatan dalam mekanisme pemantauan serta pemutakhiran data secara berkala, agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran dan meminimalisasi potensi penyalahgunaan. Adapun pandangan narasumber terkait hal tersebut disajikan sebagai berikut:

*“Kalau program ini bisa berjalan terus dengan baik dan tepat sasaran, saya yakin masyarakat bisa lebih sejahtera. Tapi jangan hanya berhenti di bantuan, perlu juga ada pendampingan dari pihak pendamping desa supaya kami bisa memanfaatkan program ini menjadi lebih produktif serta menghasilkan nilai ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat”*

Selain membantu pemenuhan kebutuhan dasar, beberapa narasumber juga menyoroti adanya aspek pemberdayaan yang terkandung dalam program tersebut. Menurut mereka, sebagian dana desa digunakan untuk mendukung kegiatan produktif seperti pengembangan kelompok tani, pemeliharaan hewan ternak, maupun usaha kecil masyarakat desa. Kegiatan ini dianggap tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga mendorong masyarakat agar lebih mandiri secara ekonomi. Pendapat dari narasumber mengenai hal ini adalah sebagai berikut:

*“Kalau hanya dikasih bantuan makanan memang membantu, tapi cepat habis. Bedanya, dengan adanya program yang melibatkan kelompok tani atau kegiatan usaha kecil, manfaatnya bisa lebih panjang. Masyarakat bisa belajar berusaha sendiri”*

Dari segi pencapaian tujuan program, masyarakat melaporkan bahwa program ketahanan pangan melalui dana desa efektif dalam membantu mereka memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Bantuan yang diberikan dianggap mampu meringankan beban pengeluaran rumah tangga, terutama bagi keluarga dengan tingkat ekonomi rendah. Selain membantu dalam pemenuhan pangan, program ini juga mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kemandirian pangan dan pengelolaan sumber daya lokal. Edukasi yang diberikan pendamping desa, baik melalui forum musyawarah maupun sosialisasi langsung.

Mengenai keefektifan program peneliti mencoba mewawancarai narasumber yaitu penerima bantuan sebagai berikut:

*“Program ini bukan hanya sekedar memberi beras atau kebutuhan pokok, tapi juga mengingatkan kami untuk menanam sendiri di pekarangan. Jadi ada usaha untuk memenuhi kebutuhan dari hasil sendiri, bukan hanya menunggu bantuan”*

Selain itu, masyarakat juga mengapresiasi bahwa program ini memperkenalkan pemahaman tentang pentingnya menjaga ketahanan pangan secara berkelanjutan, misalnya melalui pola konsumsi sehat, pengelolaan hasil panen agar tidak cepat habis, serta kerja sama dalam kelompok tani. Pendapat dari narasumber mengenai hal ini adalah sebagai berikut:

*“Kami diajak untuk berpikir panjang, bukan hanya soal makan hari ini, tapi bagaimana supaya pangan tetap ada untuk besok dan seterusnya. Jadi kami belajar mengatur hasil panen, bahkan sebagian diajarkan untuk menabung di kelompok tani”*

Dampak nyata yang ditimbulkan oleh program ketahanan pangan melalui dana desa turut menjadi perhatian utama dalam kajian ini. Masyarakat mengemukakan adanya perbaikan kondisi ekonomi serta peningkatan pemenuhan gizi rumah tangga sejak menerima manfaat program tersebut. Kehadiran bantuan dipersepsikan bukan hanya sebagai dukungan material semata, melainkan juga sebagai bentuk pengakuan atas keberadaan mereka sebagai penerima manfaat, yang pada gilirannya menumbuhkan rasa optimisme dan semangat baru setiap periode penyaluran. Respons positif masyarakat ini mengindikasikan bahwa program ketahanan pangan melalui dana desa tidak sekadar berfungsi sebagai instrumen distribusi pangan, tetapi juga memiliki dimensi pemberdayaan dengan mendorong penerima manfaat untuk lebih mandiri dalam mengelola bantuan yang diterima.

Program Ketahanan Pangan yang bersumber dari Dana Desa di Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Melalui alokasi dana untuk penyediaan bahan pangan, penguatan kelompok tani, serta pengembangan usaha produktif berbasis desa, program ini terbukti mampu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, memperluas akses masyarakat terhadap sumber pangan, sekaligus mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi lokal. Penelitian (Akmal and Solichin, 2023) Sangat relevan, menunjukkan secara kuantitatif seberapa besar kontribusi program ketahanan pangan yang didanai desa terhadap peningkatan ekonomi desa.

Di beberapa Desa di Kabupaten Bireuen, implementasi program ini diwujudkan melalui pemberian bantuan beras bagi keluarga miskin, pembentukan kebun desa yang hasilnya dibagikan kepada warga, serta dukungan modal bagi kelompok usaha kecil seperti peternakan ayam dan budidaya ikan. Hasil wawancara lapangan menunjukkan bahwa masyarakat merasakan manfaat langsung berupa berkurangnya pengeluaran untuk kebutuhan pokok, adanya tambahan pendapatan dari hasil usaha kelompok, serta peningkatan partisipasi warga dalam kegiatan ekonomi desa. Kondisi ini mengindikasikan bahwa Dana Desa tidak hanya berperan sebagai instrumen pemenuhan pangan, tetapi juga sebagai motor penggerak peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput.

### **Simpulan (Conclusion)**

Program ketahanan pangan yang didanai oleh Dana Desa di Kabupaten Bireuen memiliki peran yang signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Program ini terbukti mampu menjawab dua persoalan utama masyarakat desa, yaitu kerawanan pangan dan keterbatasan ekonomi. Melalui peningkatan ketersediaan dan akses pangan, kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara lebih berkelanjutan. Selain itu, penguatan sektor pertanian memberikan dampak positif berupa penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, dan pemberdayaan masyarakat dalam memanfaatkan potensi lokal. Dengan demikian, implementasi program ketahanan pangan tidak hanya berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan, tetapi juga mendorong terbentuknya masyarakat desa yang mandiri, berdaya saing, dan tangguh dalam menghadapi risiko kerawanan pangan.

Respons masyarakat yang umumnya positif terhadap program, indikasi kuat bahwa program ini memberikan manfaat yang nyata dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara signifikan. Pertama-tama, respons positif ini tercermin dari pengalaman langsung masyarakat yang merasa terbantu dengan adanya Program ketahanan pangan. Masyarakat merasakan ketersediaan pangan yang lebih baik, sehingga kebutuhan sehari-hari, terutama bahan makanan pokok, dapat terpenuhi tanpa harus bergantung pada pinjaman atau pengeluaran berlebih. Hal ini menciptakan rasa aman dan mengurangi kekhawatiran terhadap kekurangan pangan. Program ini tidak hanya memberi bantuan, tetapi juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk belajar mengelola potensi lokal. Respons positif ini mencerminkan apresiasi terhadap upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup mereka melalui Program ketahanan pangan yang didanai oleh Dana Desa.

### **DAFTAR PUSTAKA (References)**

1. Akmal, S. and Solichin, S. (2023). Pengaruh Program Ketahanan Pangan Dana Desa Terhadap Perekonomian Masyarakat Desa, *Jurnal Administrasi Bisnis Nusantara*, 2(1), pp. 23–28. doi:10.56135/jabnus.v2i1.84.
2. Arifin, M.Z. et al. (2024). Membumikan Teori Negara Kesejahteraan Dalam Penguatan Dana Desa Untuk Pengentasan Kemiskinan Menurut Keadilan Distributif, *Journal Of Law And Social Society*,

- 1(2), pp. 29–42. doi:10.70656/jolasos.v1i2.158.
3. Ariyanti, D. and Sukmana, H. (2024). Implementasi Ketahanan Pangan (Studi Kasus Desa Tropodo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo), *Inovasi Pembangunan – Jurnal Kelitbangan*, 12(1), pp. 83–96.
  4. H. Zou (2024). The social welfare effect of environmental regulation: an analysis based on Atkinson social welfare function, *J. Clean. Prod.*, 434. doi:https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.140022.
  5. Iriyanto, T. *et al.* (2025). Pengelolaan dana desa untuk kegiatan ketahanan pangan di desa ciherang kecamatan banjarsari kabupaten Ciamis, 3(5), pp. 167–173.
  6. Lindayadia, L., Hayati, M. and Fransisco, F. (2025). Analisis Pemanfaatan Dana Desa dalam Program Ketahanan Pangan Berbasis Partisipasi Pemberdayaan Masyarakat (Studi di Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah), *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(4), pp. 2434–2445. doi:10.38035/rj.v7i4.1626.
  7. Marwan, Win Konadi, Alfi Syahrin, Kamaruddin, Rahmat (2023). *Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed Method dilengkapi analisis data dengan SPSS*, Banda Aceh: Bandar Publishing. ISBN: 978-623-449-205-7
  8. Nurwanto, A., Marwanti, S. and Antriyandarti, E. (2023). Penyediaan Akses Pangan Melalui Pemanfaatan Dana Desa Di Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, *Prosiding Seminar Nasional Hasil Kajian Sosial Ekonomi Pertanian*, 2(1), pp. 40–45.
  9. Pinstrup-Andersen, P. and Watson, D.D. (2011). Food Security and Poverty Reduction: The Role of Food Aid, *Food Policy*, 36(3), pp. 383–387.
  10. Pratama, I.N., Saputra, A. and Syaputra, S.K. (2025). Ketimpangan Sosial dan Kemiskinan: Analisis Literatur Sistematis terhadap Perspektif Ekonomi dan Sosial, *Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik)*, 5(1), pp. 13–28. doi:10.47134/rapik.v5i1.80.
  11. Rizkina, A. *et al.* (2024). The Reaction of Poverty to Consumption and Inflation in Indonesia, *Electronic Journal of Education, Social Economics and Technology (eJESSET)*, 5(2), pp. 291–297.
  12. Saddam Husain Tamrin, Tamrin, S.H. and Nurdiyah (2023). Analisis Faktor Keberhasilan Pelaksanaan Program Ketahanan Pangan di Desa Simbang Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene, *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu*, 9(4), pp. 803–817. doi:https://doi.org/10.25157/moderat.v9i4.3315.
  13. Silvia Zahara *et al.* (2024). Village Fund and Rural Poverty: Evidence from North Aceh, the Poorest Region in Aceh, *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 12(2), pp. 55–70. doi:10.22500/12202452625.
  14. Sugiyono (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
  15. Suhartono, Reski Ayu Magfira Alimuddin, N. (2025). Evaluasi Alokasi Dana Ketahanan Pangan, Dampaknya terhadap Warga, dan Perubahan Iklim di Desa Lempangang, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan (2022–2025), *Jurnal Simki Economic*, 8(2), pp. 653–663.
  16. Suhud and Yuanita (2019). *Solusi Pangan Indonesia*. Solusi Bangsa Center.
  17. Sumarto, N.H.M.I.T.D.S. (2025). The impact of village funds on rural welfare in Indonesia: A regression discontinuity in time (RDIT) and difference in difference (DiD) approach, *Applied Economics Letters*, p. 1360-1367.
  18. Suyastiri, N.. (2022). Diversifikasi konsumsi Pangan Pokok Berbasis Potensi Lokal dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Rumah Tangga Pedesaan di Kecamatan Semin Kabupaten Gunung Kidul, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 4(2), pp. 51–60.
  19. T. Sudaryanto *et al.* (2023). Regional rural transformation and its association with household income and poverty incidence in Indonesia in the last two decades, *J. Integr. Agric.*, 22(12), pp. 3596–3609.
  20. Wang, Y. (2023). Rapid socioeconomic change represented by catering industry contributes to poverty eradication in China, *Habitat Int*, 138, p. 102876. doi:https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2023.102876.
  21. Y. Song, Gao, J. and M. Zhang (2023). Study on the impact of energy poverty on income inequality at different stages of economic development: evidence from 77 countries around the world, *Energy*, 282. doi:https://doi.org/10.1016/j.energy.2023.128816.
  22. Yuliana, I. (2018). Village Funds Utilization Strategy to Improve Food Security, *Efficient: Indonesian Journal of Development Economics*, 1(2), pp. 143–156. doi:10.15294/efficient.v1i2.30155.
  23. Zakiah, Z. and Fauzan, F. (2018). Simulation of Government Policy Impact on Food Security and Poverty in Aceh, *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 34(2), pp. 301–309. doi:10.29313/mimbar.v34i2.3454.